

# Konsep Bantuan Luar Negeri Cina ke Indonesia sebagai Kedok Investasi (Studi Kasus: Implikasi Pengiriman Tenaga Kerja Asing Cina)

**Reva Rinanda Siregar**

Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Simpang Baru, Riau 28293  
revarinandasiregar@yahoo.co.id  
Submitted: 22 October 2015, Accepted: 18 February 2016

## Abstract

*The research about China's foreign aid for Indonesia is deemed important as the economic growth of China has been skyrocketing for past decades. This growth crowned China as the world's new economic power. While china keeps on strengthening its economy, several countries in different parts of the world are going through stagnant economic growth. This gives new hopes for many countries to cooperate with China, Indonesia is of no exception, since Indonesia is said to be a promising land of investation. This research utilizes the qualitative method by using case study. The results obtained are, first, for Indonesia, China is bringing positive influence because China is in dire need of raw materials from Indonesia for their industry, where Indonesia is thought as a receiving market of the abundant product from China. Secondly, China left bad influence on local labour competition which creates imbalance between local labour and Chinese labour. Thirdly, China's foreign aid is not voluntary as these helps are aimed to conduct a one belt diplomacy of China to rule over strategic route of International trading in Indonesia.*

*Key Words: China, foreign aid, foreign debt, foreign labour.*

## Abstrak

Penelitian mengenai bantuan luar negeri Cina ke Indonesia menjadi sangat penting dilakukan karena pertumbuhan ekonomi Cina berkembang pesat selama beberapa dekade. Pertumbuhan ini telah menjadikan Cina sebagai kekuatan ekonomi dunia yang baru. Sementara Cina terus memperkuat ekonominya, beberapa negara di bagian dunia lainnya sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Hal ini berarti memberikan harapan baru bagi banyak negara untuk bekerjasama dengan Cina, tidak terkecuali Indonesia, dimana Indonesia merupakan ladang investasi yang cukup menggiurkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah *pertama*, bagi Indonesia, Cina memberikan dampak positif karena Cina sangat membutuhkan bahan baku dari Indonesia terhadap industri di Cina, dimana Indonesia dipandang sebagai pasar yang siap menampung banjir produk dari negara tersebut. *Kedua*, Cina memberikan dampak negatif bagi persaingan tenaga kerja yang mengakibatkan ketimpangan sosial antara tenaga kerja asal Cina dengan tenaga kerja dalam negeri. *Ketiga*, bantuan luar negeri Cina tidak bernilai suka rela dimana bantuan tersebut bertujuan untuk melaksanakan sistem *one belt diplomacy of China* demi menguasai jalur strategis perdagangan internasional di Indonesia.

Kata Kunci: *China, Bantuan Luar Negeri, Hutang Luar Negeri, Tenaga Kerja Asing.*

---

## PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan salah satu kajian ekonomi-politik internasional dimana kajian ini merupakan suatu instrumen penuntun bagi para penstudi ilmu Hubungan Internasional. Dalam ekonomi-politik internasional dijelaskan mengenai motivasi pemberian bantuan luar negeri ini, alasan pemberian bantuan

oleh suatu negara atau institusi tertentu, terutama adalah *self interest* politik, strategi dan ekonomi. Sekalipun pada umumnya alasan itu berupa motivasi moral, bantuan kemanusiaan atau bantuan untuk kesinambungan proses hubungan komplementasi dan pembangunan pihak lain. Namun demikian sulit

ditemukan bukti-bukti sejarah perkembangan bantuan luar negeri selama periode tertentu yang menunjukkan bahwa negara donor atau institusi-institusi kredit internasional membantu tanpa mengharapkan keuntungan tertentu.

Menyangkut krisis hutang luar negeri Indonesia akibat melemahnya nilai tukar rupiah dan bersumber pada penurunan harga minyak. Selain itu, Indonesia yang berpendapatan menengah tidak dapat memacu pertumbuhannya karena kesulitan dana segar internasional yang diakibatkan para kreditor menerapkan pinjaman bersyarat “keras” (non-konsensional) dalam prioritas utama. Sekalipun pinjaman luar negeri telah ditetapkan dengan syarat yang amat keras (bunga komersil), peminjaman terus saja berlangsung. Pasar modal memegang peranan utama dalam peningkatan pinjaman luar negeri itu hingga mencapai tiga kali lipat daripada pinjaman terdahulu.

Dengan demikian tampak jelas, bahwa adanya unsur kebutuhan utama bagi pembangunan industri yang dikembangkan di Indonesia, menggantungkan diri kepada negara-negara donor yang berasal dari negara-negara maju pemilik MNC/TNC dan juga pasar bebas internasional yang menjadi pusat-pusat bursa keuangan dunia. Krisis hutang luar negeri akibat pembengkakan yang begitu besar terhadap posisi utang dasar, bunga dan angsuran telah melabilkan neraca pembayaran negara-negara debitor. Akibatnya negara-negara kreditor juga mengalami depresi keuangan mereka, karena acap kali Indonesia tidak sanggup untuk membayar, sekalipun hanya pembayaran bunga.

Namun demikian, *anekdot* masalah ketergantungan dan keterbelakangan di Indonesia sesungguhnya tidaklah sirna, karena ambisi Indonesia tidak pernah luntur untuk menarik keuntungan-keuntungan dari belahan dunia maupun melalui instrumen seperti halnya interdependensi dan globalisasi yang mulai menjagat. Ketergantungan membawa pandangan ke arah model-model pembangunan terstruktur dengan asumsi dasar sebagai gejala ketidakseimbangan dan ketidakadilan sistem internasional, namun dari sisi kesalingtergantungan, asimetris pada pola hubungan

perdagangan internasional juga pada akhirnya kembali dijadikan proses eksploitasi secara terselubung yakni ketidakharmonisan ekosistem dan lingkungan. Hal itu sudah terbukti dari teori pembangunan yang dijadikan model berlatar belakang kasus-kasus empirik ekonomi, kehidupan politik dan intelektual. Namun, konsep oposisi terhadap kapitalisme yang diusung Indonesia, memang sukar diantisipasi karena secara realis dan ideologis, aplikasi substansif ekonomi-politik sudah dijadikan bagian dari proses strategi global negara-negara industri baru seperti Cina dan Singapura dengan menerapkan “aturan main” yang mereka kehendaki.

Walaupun demikian, proses pembangunan berkelanjutan di Indonesia sedang berkembang. Perkembangan ini telah mendorong keseimbangan pola hubungan dan pola pembangunan di antara Indonesia dengan negara-negara industri baru terutama Cina yang sama-sama mengalami ketergantungan di abad XXI ini.

Perekonomian Indonesia mengalami perlambatan meskipun cenderung stabil. Laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat bahwa pada triwulan I tahun 2014, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,21 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi yang diukur dari kenaikan produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,95 persen dibanding triwulan IV tahun 2013. Namun, realisasi tersebut melambat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV tahun 2013 sebesar 5,72 persen dan sepanjang 2013 yang mencapai 5,78 persen. Data tersebut kemudian diperkuat dengan rilisnya laporan dari Badan Pusat Statistik pada 5 Mei 2015 yang menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia pada triwulan I terhadap triwulan I 2014 tumbuh sebesar 4,71 persen dan melambat dibanding periode yang sama pada tahun 2014 sebesar 5,14 persen. Krisis perekonomian global yang masih berlangsung hingga saat ini telah mengakibatkan perlambatan ekspor dan merupakan salah satu faktor yang mendorong perlambatan ekonomi Indonesia. Krisis perekonomian

global juga mempengaruhi perekonomian hampir seluruh negara di dunia yang mengalami perlambatan ekonomi.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini harus dijadikan cambuk bagi Indonesia untuk memperbaiki kinerja perekonomian di tengah keadaan ekonomi global yang belum membaik.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki utang luar negeri tertinggi di dunia. Pembiayaan utang pemerintah dapat dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) atau melalui pinjaman, baik pinjaman luar negeri maupun dalam negeri. Melalui terbitnya "Nota Keuangan & Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2013" oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia diketahui bahwa perkembangan pembiayaan utang pemerintah selama lima tahun terakhir dalam periode 2008-2012, realisasi pembiayaan utang pemerintah meningkat rata-rata sebesar 20,6 persen. Pada tahun 2008 pembiayaan utang pemerintah mencapai sebesar Rp 67,5 triliun dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi Rp 161,5 triliun di tahun 2013. Berdasarkan APBN tahun 2013, pembiayaan tersebut bersumber dari SBN (neto) sebesar Rp 180,4 triliun, pinjaman luar negeri (neto) sebesar negatif Rp 19,5 triliun, dan pinjaman dalam negeri (neto) sebesar Rp 0,5 triliun.

Oleh karena itu, untuk membiayai hutang luar negeri, saat ini Indonesia membangun kemitraan strategis dengan negara-negara industri baru seperti Cina, Hongkong, dan Singapura dan membutuhkan para investor untuk menanamkan modal terutama dalam bidang pembangunan infrastruktur dimana kerjasama tersebut diharapkan dapat menepis hutang luar negeri Indonesia yang semakin bertambah.

## KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analisis dengan menganalisis bantuan asing dari Cina ke Indonesia sebagai kedok investasi, dimana adanya latar belakang Cina memanfaatkan lemahnya situasi perekonomian Indonesia dan sumber daya (tenaga kerja dan sumber daya alam). Bahan dan informasi

dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai macam sumber, antara lain menggunakan data sekunder. Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan tinjauan pustaka.

## PERSPEKTIF KEPENTINGAN NASIONAL SUATU NEGARA

Untuk lebih memahami konsep kepentingan nasional, kita dapat menggunakan beberapa perspektif, diantaranya perspektif Realis dan Konstruktivis. Dari perspektif Realis, kepentingan nasional didefinisikan dengan ukuran *power*, karena dunia internasional berada dalam sebuah "*Hobbesian state*" dimana semua anggotanya haus akan kekuatan. Kepentingan nasional harus bisa mengalahkan kepentingan kelompok, golongan, maupun individu untuk kepentingan masyarakat luas. Kepentingan nasional juga bersifat jangka panjang maupun pendek, artinya terkadang kebutuhan jangka panjang dapat mengalahkan kebutuhan jangka pendek maupun sebaliknya.

Pada kenyataannya, kepentingan nasional bukanlah sesuatu yang statis, artinya bahwa setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda dan dapat berubah-ubah. Hal ini mendasari lahirnya perspektif Konstruktivis. Suatu studi oleh Martha Finnemore (1996), dalam Glanville L. (2005:4), mengatakan bahwa negara memang mencari *power*, keamanan, dan kekayaan, namun hal-hal tersebut hanya merupakan cara untuk mencapai tujuan akhir dan nilai-nilai yang harus ditentukan oleh negara itu sendiri. Substansi dari kepentingan nasional dikonstruksi dari hasil interaksi negara dengan negara lain.

Menurut Miroslav Nincic (1999:1) bahwa salahsatunya, kepentingan nasional dapat didefinisikan sebagai sebuah kebutuhan yang telah dilegitimasi dan diakui oleh bangsa, serta berhubungan dengan kebijakan. Ada tiga prinsip sebuah kepentingan nasional. Pertama, adalah *inclusiveness*, yaitu klaim kepentingan negara harus mewakili bangsa secara keseluruhan, tidak hanya golongan kepentingan atau individu saja. Kedua, *exclusiveness*, yaitu kepentingan nasional tidak mencakup hal-hal mengenai kelompok yang berada di luar yurisdiksinya. Ketiga, *external relevance*, yaitu kebutuhan-kebutuhan tersebut

terpengaruh oleh lingkungan dan kegiatan internasional.

Nincic mengusulkan dua metode pendekatan dalam memahami konsep kepentingan nasional, yaitu pendekatan Asumtif dan pendekatan Enumeratif. Pendekatan Asumtif mirip dengan perspektif Realis dalam arti pendekatan ini didasari asumsi bahwa anggota masyarakat internasional selalu mencari *power*, hingga terjadi anarki dan menjadikan *power* dan keamanan lebih penting diatas segalanya. Kebijakan yang dibuat untuk memastikan kedua hal tersebut dikatakan membantu mencapai kepentingan nasional. Pendekatan Enumeratif, di sisi lain, didasari oleh tujuan akhir yang ingin dicapai, dengan menetapkan seperangkat tujuan yang memiliki properti yang mendefinisikan kepentingan nasional. Pendekatan ini berusaha menentukan batasan dari apa yang bisa disebut kepentingan nasional, diantaranya mencakup keamanan, kesejahteraan, hak hidup, kebebasan, properti, prestise, dan lain sebagainya.

#### TEORI KONSTRUKTIVISME

Menurut Robert Jackson dan Georg Sorensen (2009:307), teori konstruktivisme berpendapat bahwa dunia sosial, termasuk hubungan internasional, merupakan suatu konstruksi manusia. Kaum konstruktivis sebagian sejalan dengan kaum posmodernis yang percaya bahwa tidak ada sesuatu seperti “kebenaran”. Finnemore (1996) dalam Martin Griffiths (2007:63) memandang perilaku negara melalui mata konstruktivis dipandang sebagai *norm-driven* (didorong oleh norma), dimana negara-negara berusaha untuk memastikan korespondensi antara perilaku mereka sendiri dan keputusannya untuk bertindak secara legitimasi yang menyatakan hal tersebut berasal dari identitas mereka. Sehingga, muncul konsep “*logic of appropriateness*” sebagai alasan suatu negara bertindak.

Di lain hal, kontra dengan keyakinan bahwa perilaku negara diatur oleh “*logic of appropriateness*”, maka Baldwin (1993), dalam Martin Griffiths (2007:63) berpendapat bahwa negara bertindak dengan dorongan “*logic of consequences*”. Negara dalam

pandangan ini dipahami sebagai “egois rasional” yang mengejar kepentingan luar negaranya untuk interaksi sosial secara rasional instrumental, melalui kerjasama atau konflik yang ditentukan bukan oleh ada atau tidaknya norma-norma yang mendorong, melainkan dengan kombinasi keterbatasan sumber daya (karena terbatasnya kemampuan negara) dan adanya kecocokan, atau kekurangan itu menjadikan negara memandang antara kepentingan mereka sendiri dengan kepentingan negara lain.

#### PERANAN BANTUAN LUAR NEGERI DALAM PEMBANGUNAN

Antara negara pemberi bantuan maupun negara yang diberi bantuan sesungguhnya menerima manfaat (ada juga dampak kegagalan) dari bantuan luar negeri. Dari sudut pemberi bantuan, konsep ini beranjak dari asumsi tentang besarnya timbal balik yang dapat diterima, baik yang diukur (atau dinilai) langsung maupun tidak langsung, tergantung kepada besar-kecilnya atau motivasi nilai bantuan yang mengalir kepada negara penerima. Masyarakat negara pemberi bantuan dapat menerima manfaat dari bantuan itu baik langsung maupun tidak langsung berupa hasil-hasil sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, melalui berbagai efek positif dari bantuan itu.

##### a) Motivasi Politik

Motivasi politik didasarkan pada latar belakang tertentu negara/lembaga pemberi bantuan terhadap negara-negara yang diberi bantuan baik atas dasar sejarah maupun pertimbangan lainnya. Bantuan luar negeri dikaitkan dengan keutuhan suatu rezim dengan maksud agar yang bersangkutan mendukung berbagai kebijakan pemerintah dan diikuti pula oleh identifikasi mengenai besarnya dedikasi negara debitor dalam hubungan kerjasama maupun keterkaitan politis dengan negara kreditor. Menurut Alan Rix (1993:18-19) bahwa motif politik dalam bantuan luar negeri memusatkan tujuan untuk meningkatkan *image* negara donor. Peraih tujuan menjadi orientasi dari pemberian bantuan luar negeri baik dari politik domestik dan hubungan luar negeri donor.

##### b) Motivasi Ekonomi

Menurut Yanuar Ikbar (2007:191-192) bahwa motif ekonomi merupakan pembenaran yang paling rasional untuk pemberian bantuan, argumentasi esensial dari bantuan luar negeri yang secara mendasar dapat dipahami dari beberapa konsep:

1. Sumber daya dan kapabilitas keuangan dari luar (untuk pinjaman dan hibah);
2. Bantuan luar negeri kebanyakan diberikan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan di negara-negara yang diberi bantuan;
3. Bantuan luar negeri tidak hanya berbentuk modal, tetapi juga tenaga ahli dan manajemen dan alih teknologi;
4. Pengalihan investasi untuk tujuan mendekati pasar, perluasan industrialisasi internasional di luar negeri pemberi bantuan dan pengalihan industri senja.

Sedangkan terdapat indikator atau faktor yang menyebabkan negara-negara melakukan pinjaman luar negeri, baik yang bersifat konsensial (lunak) maupun bukan konsensial (syarat ketat) yaitu:

1. Alasan ekonomi;
2. Alasan moralitas/kemanusiaan;
3. Alasan strategis.

Suatu studi oleh H. Chenery dan A. Stent (1983), dalam M. L. Jhingan (1990:614), menunjukkan bahwa dalam konteks prioritas alasan ekonomi, ditinjau dari sudut pemberi bantuan maupun peminjam dana, terdapat dua orientasi yang menjadi model yakni model kesenjangan (hambatan kekurangan devisa) dan model kesenjangan tabungan. Terdapat dua jurang dalam pembangunan ekonomi sebagai kendala yang terpisah dan independen pada pencapaian target tingkat pertumbuhan di tingkat negara-negara terbelakang. Bantuan luar negeri dipandang sebagai suatu cara atau alternatif untuk menutup kedua jurang itu dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan.

#### KEBIJAKAN TENAGA KERJA ASING KE INDONESIA

Kebijakan dasar dalam hukum ketenagakerjaan adalah untuk melindungi pihak yang lemah, dalam hal ini adalah pekerja atau buruh dari kesewenang-wenangan majikan atau pengusaha yang dapat timbul

dalam hubungan kerja dengan tujuan memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan keadilan sosial. Perlu diketahui bersama bahwa timbulnya hukum ketenagakerjaan ini dikarenakan adanya ketidaksetaraan posisi tawar yang terdapat dalam hubungan ketenagakerjaan (antara pekerja/buruh dengan majikan/pengusaha), dengan alasan itu pula maka dapat dilihat bahwa tujuan utama hukum ketenagakerjaan adalah agar dapat meniadakan ketimpangan hubungan antara keduanya.

Berdasarkan rumusan yang dikemukakan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) Nomor 13 Tahun 2003, maka dapat dipahami bahwa yang diatur dalam UUK adalah segala yang berkaitan dengan pekerja/buruh baik itu hal-hal yang ada sebelum masa kerja (pemagangan, pengumuman lowongan kerja, dan lain sebagainya) dan hal-hal lain yang menyangkut perlindungan kerja (upah, jaminan sosial, keselamatan kerja, pengawasan kerja, dan lain-lain) dan termasuk juga terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia serta hal-hal yang menyangkut kewajiban sesudah masa kerja (pesangon, pensiun, jaminan hari tua, dan lain-lain). Khusus bagi Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disebut TKA) dewasa ini sudah menjadi suatu fenomena yang lumrah karena pada dasarnya juga telah ada sejak dimulainya industrialisasi di muka bumi ini dan penggunaan TKA di Indonesia sendiri terus mengalami perkembangan dan perubahan sesuai zamannya mulai dari zaman kolonial Belanda sampai sekarang ini.

Kondisi perekonomian yang kurang menarik di negaranya sendiri dan penghasilan yang cukup besar dan yang tampak lebih menarik di negara tujuan telah menjadi pemicu terjadinya mobilitas tenaga kerja secara internasional. Pendapatan yang meningkat di negara yang sedang berkembang memungkinkan penduduk di negara berkembang untuk pergi melintas batas negara, informasi yang sudah mendunia dan kemudahan transportasi juga berperan meningkatkan mobilitas tenaga kerja secara internasional.

Menurut Agusmidah (2010:103) bahwa dari dulu sampai sekarang masalah ketenagakerjaan pada dasarnya ada dua, yaitu pada masalah kesempatan kerja

dan masalah kualitas tenaga kerja. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi mengakibatkan jumlah angkatan kerja setiap tahunnya semakin meningkat, sedangkan kesempatan kerja yang tersedia belum dapat memenuhi kebutuhan kerja sesuai dengan jumlah pencari kerja yang ada. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan antara besarnya jumlah penduduk yang membutuhkan pekerjaan dengan kesempatan kerja yang tersedia. Apalagi sekarang ini ditambah dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dari perusahaan tempatnya bekerja.

## PEMBAHASAN

Kerjasama ekonomi dan perdagangan yang rutin sejak lama telah dinikmati oleh Indonesia-Cina karena kedua negara tersebut memiliki kebudayaan yang bersejarah, jumlah penduduk yang banyak dan pengaruh yang signifikan dari daerah. Kerjasama ini tidak hanya bertujuan menjaga perdamaian secara kondusif, stabilitas dan kemakmuran daerah tetapi juga meningkatkan kemajuan ekonomi negara-negara berkembang.

Hubungan bilateral antara Indonesia-Cina dimulai sejak tahun 2005, dimana kedua negara membentuk kemitraan strategis dalam rangka menciptakan hubungan yang komprehensif. Sikap Indonesia yang demikian dianggap "bersahabat" terhadap kepentingan Cina dibandingkan negara-negara lainnya di kawasan yang dipandang konfrontatif. Oleh karena itu, telah menjadi kebijakan nasional Cina saat ini yang memprioritaskan peningkatan kerjasama di bidang politik dan keamanan dengan Indonesia. Kedua negara juga telah mendapat keuntungan dari kerjasama tersebut. Alman Helvas Ali dalam Forum Kajian Pertahanan dan Maritim (FKPM) mengungkapkan bahwa adanya keputusan pemerintah Cina ditahun 2012 untuk memberikan bantuan jaringan radar pengamatan maritim kepada Indonesia merupakan realisasi dari prioritas peningkatan kerjasama itu. Namun, kedua belah pihak juga tetap menjalin kerjasama di bidang lainnya seperti budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, pariwisata

dan sektor lainnya. Dalam hubungan kerjasama tersebut, penanganan isu-isu global dan reformasi struktur pemerintahan global juga menjadi sasaran utama kerjasama.

Indonesia-Cina berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara pertumbuhan berkelanjutan, stabil dan cepat, kerjasama ekonomi dan perdagangan bilateral ditingkatkan. Oleh karena itu, kerjasama kedua negara tersebut diperlukan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi kedua negara.

Pada bulan Maret 2012, sebagaimana telah disepakati dalam Pernyataan Bersama antara Republik Rakyat Cina dan Republik Indonesia, pemerintah Cina dan Indonesia setuju untuk mengembangkan Program Pengembangan Lima Tahun antara Indonesia-Cina untuk Kerjasama di Bidang Perdagangan dan Kerjasama Ekonomi 2013-2017 sesuai dengan Rencana Lima Tahun ke-12 untuk Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional Republik Rakyat Cina dan *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Republik Indonesia*.

Indonesia melihat bahwa perekonomian Cina mengalami restrukturisasi ekonomi dari sistem perencanaan pusat yang tertutup bagi perdagangan internasional, berubah menjadi sistem perekonomian yang berorientasi pasar sehingga mendorong perkembangan sektor swasta sebagai pemain utama dalam ekonomi global. Restrukturisasi perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah Cina diantaranya adalah mengembangkan pasar saham, meningkatkan pertumbuhan di sektor swasta dan juga membuka diri terhadap perdagangan asing dan investasi. Data dari *The World Bank Working for a World Free of Poverty* pada 16 Juli 2010 melangsir bahwa Cina telah berhasil dalam memobilisasi penerimaan investasi asing langsung (*foreign direct investment/FDI*). Data tersebut memperlihatkan bahwa berkaitan dengan peluang investasi negara dan pertumbuhan pasar domestik, Cina selama 10 tahun terakhir menerima sekitar 20 persen dari semua FDI ke negara-negara berkembang lebih dari US\$100 Milyar pada tahun 2008. Ragimun (2011:13), peneliti pada Pusat Kebijakan Ekonomi

Makro, Badan Kebijakan Fiskal, mengatakan bahwa dari sisi investasi, Cina mempunyai kontribusi sekitar 0,5 persen (masih dibawah 1 persen) dari total FDI setiap tahunnya di Indonesia. Menurut Ragimun, secara umum investasi negara-negara ASEAN, Jepang, dan Amerika Serikat lebih tinggi dibandingkan dengan investasi Cina ke Indonesia.

Ragimun (2011:14) dengan menggunakan data tahun 2002-2004 (sebelum perjanjian ASEAN-China *Free Trade Area/AC-FTA*) investasi negara-negara ASEAN ke Indonesia rata-rata sebesar US\$559,83 Juta pertahun. Kemudian, dengan data tahun 2005-2008 (sesudah perjanjian AC-FTA) investasi negara-negara ASEAN ke Indonesia rata-rata sebesar US\$2.265,20 Juta pertahun. Sedangkan rata-rata investasi Cina ke Indonesia hanya sebesar US\$32,43 juta sebelum perjanjian AC-FTA dan naik menjadi sebesar US\$59,33 juta. Hal tersebut dapat dikatakan juga bahwa persentase investasi Cina ke Indonesia dibandingkan dengan total investasi dunia ke Indonesia tidak ada peningkatan, sesudah perjanjian AC-FTA hanya rata-rata sebesar 0,006 persen, sedangkan sebelumnya juga rata-rata sebesar 0,006%.

Kondisi perkembangan ekonomi Cina tersebut menjadi perhatian utama dunia internasional pada saat ini, dan sejak Cina menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*) banyak negara di dunia ingin menjalin kerjasama perdagangan dengan Cina.

Indonesia melihat kebangkitan ekonomi yang pesat dari Cina sebagai kerjasama strategis antarkedua belah pihak. Saat ini, di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintahan Indonesia melanjutkan kerjasama dengan Cina yang sudah terjalin di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mengutip salah satu teori yang dikemukakan oleh Pearson dan Payasilian (1999:380-381) mengenai bantuan luar negeri, dapat diketahui bahwa bantuan luar negeri Cina ke Indonesia sebagai kedok investasi diperkuat dengan argumen teori *bureaucratic incrementalist* yang menyatakan bahwa tujuan negara donor (Cina) ke Indonesia adalah dalam lingkup kepentingan ekonomi-politik internasional, antara lain kombinasi

tujuan kemanusiaan, geopolitik, kepentingan komersil, dan berbagai faktor dalam politik domestik.

Memperkuat argumen teori *bureaucratic incrementalist*, teoritis dalam kelompok konstruktivisme, menjelaskan bahwa alasan Cina memberikan bantuan luar negeri ke Indonesia adalah didasari oleh *logic of consequences* (bertindak untuk mencapai konsekuensi). Suatu studi oleh Baldwin (1993), dalam Martin Griffiths (2007:63) menunjukkan negara Cina melalui optik ini dipahami sebagai “egois rasional” yang mengejar kepentingan diluar negaranya untuk interaksi sosial secara rasional instrumental. Dalam surplus perdagangan Cina, selama 20 tahun terakhir Cina adalah “pabrik”nya dunia. Dan selama itulah Cina mengalami surplus perdagangan sehingga cadangan devisanya terus meningkat. Akan tetapi, efek negatif dari pertumbuhan ekonomi Cina adalah menjadikan ekonomi banyak negara mengalami tekanan, karena Cina mampu memproduksi barang dengan sangat murah sehingga menekan manufaktur negara lain seperti Amerika, Eropa, termasuk juga Indonesia.

Sehingga, pernyataan “*China buy the World*” menjadi pendukung kedok investasi yang dilakukan Cina. Salah satu bentuknya adalah dengan menyalurkan kredit kepada Indonesia. Harus diakui bahwa Indonesia memiliki *raw materia* (bahan dasar) yang dibutuhkan Cina, seperti gas alam, batu bara, dan lain sebagainya. Motivasi yang berkaitan dengan kepentingan nasional Cina dalam hal ini *power*, menjadi prioritas Cina untuk mencari pengaruh yang lebih besar dalam politik dunia. Cina menjadikan investasinya di Indonesia sebagai alasan untuk peningkatan pengaruhnya dalam politik dunia. Cina melihat Indonesia sebagai pasar yang sangat besar, sehingga apabila Indonesia melambat maka penyerapan produk Cina bisa mengalami penurunan dan pengangguran di Cina bisa meningkat drastis.

Hubungan Indonesia dan Cina mencapai momentum melalui penandatanganan *Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the People’s Republic of Cina on Strategic Partnership* oleh kedua Kepala Negara pada tanggal 25 April 2005 di Jakarta.

Menurut Ragimun (2011:21) bahwa kerjasama yang

dilakukan antara pemerintahan Indonesia dengan Cina tidak lepas dari tantangan dan juga hambatan. Infrastruktur untuk mendukung dan mendorong peningkatan investasi di Indonesia masih belum memadai. Infrastruktur ini terkait dengan infrastruktur lunak (*soft infrastructure*) seperti pelayanan, iklim usaha, komunikasi, kepastian hukum, undang-undang dan lain-lain. Demikian juga infrastruktur keras (*hard infrastructure*) seperti sarana transportasi, sarana komunikasi, pelabuhan, jalan dan lain-lain. Pelayanan dan birokrasi serta iklim usaha di Indonesia masih belum optimal. Beberapa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih belum sinkron dalam mengambil kebijakan mengenai investasi, termasuk banyaknya pungutan yang akan menimbulkan biaya tinggi (*high cost*). Sedangkan Cina dianggap akan menjadi ancaman bagi Indonesia di masa mendatang karena Cina memiliki motif ekspansionis bermotifkan *one belt diplomacy*. Selain itu, Cina juga memanfaatkan distabilisasi di Indonesia dimana hal ini secara langsung maupun tidak langsung akan mengancam stabilisasi situasi dalam negeri.

Sejak terjalin kerjasama antara Indonesia-Cina, terdapat dua persepsi dimana Cina lebih mengutamakan status quo atau ancaman bagi Indonesia sebagai kekuatan revolusioner. Dari sudut pandangan pragmatis, apa yang dikehendaki oleh Cina terhadap Indonesia adalah suatu hal yang lumrah belaka. Namun di sisi lain, Indonesia sebagai suatu negara bangsa juga mempunyai kepentingan nasional yang tidak selamanya selaras dengan kepentingan Cina. Namun, hal ini tidak dapat dihindarkan karena alasan kedekatan geografis antara Indonesia-Cina dimana keuntungan bagi Cina karena Indonesia sebagai wilayah pemasaran strategis. Cina juga selalu menekankan doktrin koeksistensi damai dan kebijakan anti-hegemoni sehingga Indonesia selalu merasa khawatir tentang maksud dan tujuan kerjasama dengan Cina.

Kekhawatiran Indonesia mulai terungkap kebenarannya. Masalah Ekonomi ASEAN dan Forum Ekonomi Indonesia-Cina semakin membuka ruang bebas bagi investor terutama dari Cina menanamkan

modalnya di Indonesia. Nota kesepahaman antara Indonesia-Cina berimplikasi negatif bagi Indonesia. Ekonomi dalam negeri saat ini semakin menyusahkan masyarakat kalangan bawah ditambah pula dengan masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Namun, pada 16 Juni 2015, Menteri BUMN, Rini Soemarno, meneken perjanjian kerjasama bantuan pendanaan terhadap sejumlah BUMN di Indonesia. Pemerintah Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo meminjam uang sebesar US\$40 Milyar ke Cina dengan alasan investasi. Hutang luar negeri ini dinilai sebagai nilai kompensasi dimana Cina mengirimkan 10 juta warga negaranya untuk bekerja di Indonesia.

Sebenarnya, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 45 ayat 1, mempertegas bahwa komitmen Indonesia atas penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) didasarkan pada *economic need test*, yaitu kebutuhan untuk TKA yang dimaksud. Hal itu diperjelas dengan bidang-bidang tugas tertentu dan jabatan-jabatan tertentu yang diperkenan untuk diisi oleh TKA. Hal ini dimaksudkan agar terjadinya *transfer of knowledge*. Namun demikian, ternyata dalam kenyataannya sangat sedikit *transfer of knowledge* tersebut bila tidak mau dikatakan tidak ada.

Selain itu, Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 1 Tahun 2015 atas revisi Permenaker Nomor 12 Tahun 2013 juga merugikan tenaga kerja lokal dimana tenaga kerja asing tidak wajib berbahasa Indonesia dan terdapat kesenjangan upah yang sangat signifikan.

Menurut Laporan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Cina menyiratkan dana proyek-proyek infrastruktur di Indonesia antara lain pembangunan 24 pelabuhan, 15 bandar udara (bandara), pembangunan jalan sepanjang 1.000 kilometer (km), pembangunan jalan kereta api sepanjang 8.700 km, serta pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt (MW). Tidak hanya itu, Cina juga akan terlibat dalam pembangunan jalur kereta supercepat Jakarta-Bandung dan Jakarta-



Surabaya dengan total dana sebesar US\$100 Miliar sebagai modal investasi setelah Pemerintah Indonesia memberikan daftar proyek-proyek yang diperuntukkan bagi para investor Cina.

Hal yang jauh lebih menyakitkan bagi para tenaga kerja lokal, dari data Sekretariat Kabinet Republik Indonesia pada 30 Juni 2015, adalah kedatangan tenaga kerja Cina ke beberapa perusahaan di seluruh wilayah tanah air berdasarkan data Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang diterbitkan Kementerian Ketenagakerjaan untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) Cina dari 1 Januari 2014-Mei 2015 mencapai 41.365. TKA asal Cina yang saat ini masih berada di Indonesia sebanyak 12.837. Adapun sektor yang banyak diisi pekerja Cina ini pada periode yang sama adalah perdagangan dan jasa, yakni mencapai 26.579 IMTA, kemudian industri 11.114 IMTA, dan pertanian 3672 IMTA.

TKA Cina ini banyak menimbulkan dampak negatif bagi tenaga kerja lokal khususnya tenaga kerja setempat. Sedikit penduduk asli setempat yang dapat bekerja di proyek-proyek infrastruktur terutama di Banten dan Papua. Kedatangan tenaga kerja asing tersebut dianggap menyingkirkan buruh lokal. Dilain hal, mereka juga tidak dibekali dengan kemampuan berbahasa asing. Dalam Pasal 102 PP 31 Tahun 2013 dinyatakan dengan tegas bahwa tenaga kerja asing yang boleh bekerja di Indonesia adalah tenaga ahli dan konsultan bukan pekerjaan non-teknis. Namun pemerintah beranggapan bahwa hal ini sebagai kompensasi negara investor untuk mengirimkan tenaga kerjanya.

Masyarakat setempat dalam berbagai pemberitaan juga menganggap bahwa pemerintah tidak adil karena tenaga kerja asing tersebut juga hanya bekerja sebagai pekerja level bawah atau pekerja kasar. Selain itu, terdapat ketimpangan upah yang cukup signifikan dimana perbandingan upah tenaga kerja lokal dan asing 1:5 yang berprofesi sama.

Selain itu, TKA Cina juga dinilai tidak ramah lingkungan, mereka tidak dapat menggunakan sanitasi dengan benar sehingga lingkungan penduduk sekitar terkena imbas dengan bau tidak enak, sungai-sungai di

sekitar mereka juga tercemar oleh limbah pabrik dimana air yang biasa mereka minum sudah terkontaminasi.

Ironis keadaan tenaga kerja lokal dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang melambat dan banyak pekerja lokal mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. Oleh karena itu, bibit kecemburuan sosial dan konflik sosial akan terus meningkat. Disadari atau tidak, Indonesia telah melemahkan kepentingan nasionalnya sendiri. Kerentanan masyarakat tumbuh subur karena negara tidak mampu melindungi kepentingan nasionalnya untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakatnya.

## KESIMPULAN

Tenaga kerja asing seharusnya bekerja dibatasi pada level jabatan dan kepentingan seperti tingkat manajer atau direksi dengan level pendidikan dan *expertise* tinggi. Perusahaan-perusahaan baik asing maupun lokal di Indonesia seharusnya mempekerjakan tenaga kerja lokal dengan level buruh UMR terlebih dahulu. Dengan kondisi ekonomi Indonesia yang sedang melemah, pemerintah harus bertanggung jawab untuk melakukan deportasi massa terhadap TKA tersebut dan memperketat regulasi ketenagakerjaan dimana TKA harus bekerja sesuai dengan keahlian dan dapat berbagi ilmu kepada tenaga kerja lokal. Tindakan pemerintah sangat diharapkan agar tidak seperti kasus narkoba dan perdagangan manusia yang sudah seperti gunung es yang menyulitkan kepentingan nasional.

Pemerintah juga seharusnya lebih mawas terhadap kebijakan pembangunan dimana penduduk setempat ikut serta sebagai pekerja sehingga tidak terjadi eksodus besar-besaran ke Indonesia. Jika praktek tersebut tidak ditanggulangi segera maka rakyat Indonesia hanya akan menjadi penonton dan pengangguran di negeri sendiri. Cina menjadikan investasinya di Indonesia sebagai alasan untuk peningkatan pengaruhnya dalam politik dunia. Cina melihat Indonesia sebagai pasar yang sangat besar. Strategi Cina dengan memberikan bantuan ke Indonesia merupakan kedok investasinya.

Penulis menyimpulkan bahwa investasi Cina dinilai

sebagai kedok untuk memperluas wilayah kekuasaan, dimana Cina sedang melakukan perang asimetrik dengan Amerika Serikat (AS) karena Cina tidak dapat menghadapi AS secara militer. Cina dapat melobi Indonesia dengan mudah dengan memilih Bitung dan Sulawesi Utara sebagai kawasan ekonomi khusus dimana kedua jalur tersebut merupakan jalur Indonesia Timur ke Asia Pasifik, hal ini terjadi karena pemerintah tidak jeli dengan kajian kebijakan politik dan geopolitik yang merupakan kerangka dasar kebijakan ekonomi.

## REFERENSI

### BUKU:

- Agusmidah. 2010. *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- Balaam, David N. & Veseth, Michael. 1996. *Introduction to International Political Economy*. New Jersey: Princeton University Press.
- Baldwin, D.A. 1993. *Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate*. New York: Columbia University Press.
- Budiman, Arief. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Chenery, H. & Stent A. 1983. Dalam Jhingan, M.L. 1990. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (edisi Terjemahan). Jakarta: Rajawali Press.
- Finnemore, Martha. 1996. *National Interests in International Society*. New York: Cornell University Press.
- Gilpin, Robert. 1987. *The Political Economy of International Relations*. New Jersey: Princeton University Press.
- Griffiths, Martin. 2007. *International Relations Theory for the Twenty-First Century*. London and New York: Routledge.
- Ikbar, Yanuar. 2007. *Ekonomi Politik Internasional: Implementasi Konsep dan Teori*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Jackson, Robert & Sorensen, Georg. 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Keohane, Robert O. & Nye, Joseph S. 1977. *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. Boston: Little Brown Company.
- Pearson, Frederick S. & Payaslian, Simon. 1999. *International Political Economy: Conflict and Cooperation in the Global System*. USA: McGraw-Hill College Press.
- Perwita, Anak Agung Banyu & Yani, Yanyan Mochamad. 2011. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rix, Alan. 1993. *Japan's Foreign Aid Challenge: Policy Reform and Aid Leadership*. London and New York: Routledge.
- Sinaga, Lidya Christin. 2013. *Hubungan Indonesia-Cina dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Ekonomi, dan Ekonomi di Asia Tenggara*. Jakarta: LIPI Press.
- Soenarko. 2000. *Public Policy: Pengertian pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Viotti, Paul R. & Kauppi, Mark V. 2012. *International Relations Theory*. USA: Pearson.
- Winarni, Budi. 2011. *Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- JURNAL, WORKING PAPERS, DAN ARTIKEL ILMIAH:**
- Ali, Alman Helvas. Fokus: '*Indonesia dari Perspektif Kepentingan China: Suatu Tinjauan*', Forum Kajian Pertahanan dan Maritim (Center for Defense and Maritime Studies), 30 Agustus 2012, Tersedia di: <<http://www.fkpmaritim.org/indonesia-dari-perspektif-kepentingan-china-suatu-tinjauan/>> [Online] (Diakses pada: 01 Oktober 2015).
- Departemen Perdagangan, PRC. Fokus: '*Seventh China-ASEAN Expo closes in South China, boosting FTA Operations*', 25 Oktober 2010, Tersedia di: <[http://fta.mofcom.gov.cn/enarticle/enrelease/201010/3820\\_1.html](http://fta.mofcom.gov.cn/enarticle/enrelease/201010/3820_1.html)> [Online] (Diakses pada: 29 September 2015).
- Djumena, Erlangga. Fokus: '*Benarkah Pekerja Asal China Menyerbu Indonesia?*', 30 Juni 2015, Tersedia di: <<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/06/30/1404002/Benarkah.Pekerja.Asal.China.Menyerbu.Indonesia.Ini.Penjelasan.Menaker>> [Online] (Diakses pada: 01 Oktober 2015).
- Finnemore, Martha. 1996. Dalam Glanville, Luke. 2005. *Who Are We to Think about the National Interest?*. *Australian Quarterly*, Vol. 77, No. 4; hal. 33-37.
- Fokus: '*Program Pengembangan Lima Tahun antara Indonesia-China untuk Kerjasama di bidang Ekonomi dan Perdagangan* [Online]. Tersedia di: <[treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/download/2572](http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/download/2572)> [Online] (Diakses pada: 28 September 2015).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Fokus: '*Triwulan I-2014 Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,21 Persen*', 05 Mei 2014, Tersedia di: <<http://www.kemenkeu.go.id/Berita/triwulan-i-2014-ekonomi-indonesia-tumbuh-521-persen>> [Online] (Diakses pada: 26 Desember 2015).
- Nincic, Miroslav. 1999. *The National Interest and Its Interpretation*. *The Review of Politics*, Vol. 61, No. 1; hal. 29-55.
- Ragimun. 2011. *Analisis Investasi Cina ke Indonesia Sebelum dan Sesudah ACFTA*. Peneliti pada Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal (Email: ragimun@gmail.com).
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Fokus: '*Inilah Penjelasan Menaker Hanif Dakhiri Soal Isu Eksodus Tenaga Kerja Asing Asal China Ke Indonesia*', 30 Juni 2015, Tersedia di: <<http://setkab.go.id/inilah-penjelasan-menaker-hanif-dakhiri-soal-isu-eksodus-tenaga-kerja-asing-asal-china-ke-indonesia/>> [Online] (Diakses pada: 24 Desember 2015).
- The World Bank Working for a World Free of Poverty. Fokus: '*Foreign Direct Investment-The China Story*', 16 Juli 2010, Tersedia di: <<http://www.worldbank.org/en/news/feature/2010/07/16/foreign-direct-investment-china-story>> [Online] (Diakses pada 24 Desember 2015).
- DOKUMEN RESMI:**
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Laporan Triwulan I Tahun 2013 Deputi Ekonomi Bappenas. Naskah Program Pengembangan Lima Tahun antara Indonesia-China untuk Kerjasama di bidang Ekonomi dan Perdagangan. Nota Keuangan & Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2013.